

ANALISIS KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA PASCA KRISIS EKONOMI DI PROPINSI JAWA BARAT

MEWA ARIANI DAN TRI BASTUTI PURWANTINI

Peneliti Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian

Jl. Ahmad Yani No. 70 Bogor

ABSTRACT

Food is the most fundamental need for household, directly related to the quality of human resources. The objective of this paper is to analyze the pattern of household food consumption in West Java province after economic crisis. Data are from SUSENAS year 1996, 1999 and 2002. The results are : 1) Prosperity level of households after economic crisis is getting better, but it still lower than condition before crisis, 2) When the economic crisis happened, energy and protein consumptions of household decreased and the slope of it in West Java province was higher than national level. After economic crisis, consumption level of both nutrients then increase again, 3) Consumption of rice decrease after crisis, but consumption of instant noodle increase. The pattern of staple food consumption also change from rice pattern to rice-noodle pattern based of both region and income group. The implications of the policy is developing program of food diversification in the future must be implemented in more accurate way, supported by deeper research about consumer behavior. Besides, efforts to increase purchasing power and availability of some commodities such as animal foods, vegetables and fruits must be done. In accordance with that, people awareness of food, nutrition and health must be increase too. Political will and political power of governments are the success deciders.

Key Word: Food, Consumption, Household, Economic Crisis, West Java.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu (Saliem, dkk; 2002).

Pangan sebagai bagian dari hak azasi manusia (HAM) mengandung arti bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya. Menurut Suryana (2004) pemenuhan kebutuhan pangan dalam konteks ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembentukan sumberdaya manusia berkualitas yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tataran global.

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa ketersediaan pangan per kapita sampai dengan tahun 1996 cenderung berlebih dibandingkan dengan tingkat konsumsi riil

penduduk (Sawit dan Ariani, 1997; Erwidodo dkk, 1999; Ariani dkk, 2000). Terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 berdampak pada perubahan pola konsumsi pangan penduduk. Hasil kajian Ariani dkk (2000) menunjukkan bahwa secara nasional krisis ekonomi antara lain berdampak pada peningkatan pangsa pengeluaran pangan rumahtangga dan peningkatan jumlah rumahtangga defisit energi dan protein, perubahan tersebut terjadi pada semua segmen rumahtangga baik kota/desa maupun kelompok pendapatan (rendah, sedang dan tinggi).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsumsi pangan pasca krisis ekonomi di Propinsi Jawa Barat. Aspek yang dianalisis adalah struktur pengeluaran pangan, konsumsi energi dan protein, pola dan tingkat konsumsi pangan.

METODOLOGI PENGAJIAN

Sumber Data

Data yang digunakan untuk menganalisis perkembangan konsumsi pangan rumah tangga di Propinsi Jawa Barat adalah data Survei Sosial Ekonomi Pertanian (SUSENAS) tahun 1996, 1999 dan 2002. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk publikasi dan bentuk data mentah yang kemudian diolah dengan menggunakan *Personal Computer* (PC) dengan program SAS. Jumlah rumah tangga yang dianalisis dalam SUSENAS tahun 1996, 1999 dan 2002 untuk Propinsi Jawa Barat berturut-turut sebesar 7.928, 7.928 dan 6.943 rumah tangga. Sementara total rumah tangga yang dianalisis untuk agregat nasional berturut-turut sebesar 50.893, 61.473 dan 62.555 rumah tangga.

Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk tabel-tabel berdasarkan wilayah (kota dan desa) dan kelompok pangan. Untuk mengetahui posisi perkembangan konsumsi pangan rumah tangga di Propinsi Jawa Barat dibandingkan dengan daerah lain, maka dalam analisis ini juga disajikan data konsumsi pangan untuk tingkat nasional. Selain itu, juga disajikan data konsumsi pangan sebelum dan masa krisis ekonomi, sehingga dapat diketahui perkembangan konsumsi pangan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pengeluaran Pangan Rumah Tangga

Pengeluaran total dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Proporsi antara pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Dari proporsi pengeluaran pangan dapat diungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan berarti tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah atau rentan.

Secara absolut, pengeluaran pangan baik pada tingkat nasional maupun di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Selama tahun 1996-2002, laju peningkatan pengeluaran pangan tingkat nasional sebesar 49,9 persen, di kota sebesar 49,0 persen dan di desa sebesar 47,9 persen. Rata-rata peningkatan laju pengeluaran pangan di propinsi Jawa Barat masih lebih kecil dibandingkan dengan nasional yaitu 45,7 persen di kota dan 45,3 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Nasional dan Propinsi Jawa Barat Menurut Wilayah (Rp/kap/bulan)

Wilayah	Indonesia			Jawa Barat		
	1996	1999	2002	1996	1999	2002
Kota	48 278 (48,0)	101 394 (56,2)	144 352 (52,8)	52 022 (47,1)	94 035 (55,4)	138 936 (55,1)
Desa	33 345 (63,3)	76 854 (70,2)	101 692 (66,6)	38 661 (60,8)	79 791 (68,5)	106 742 (66,2)
Kota+Desa	38 725 (55,3)	86 511 (62,9)	120 649 (58,5)	44 418 (53,0)	86 582 (61,0)	123 685 (59,2)

Keterangan : Angka dalam kurung adalah pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran (%)

Sumber: Susenas, 1996, 1999 dan 2002 (diolah)

Dengan membandingkan data pangsa pengeluaran antara kota dan desa menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kota lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (Tabel 1). Kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada agregat nasional tetapi juga di propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti kebijakan perekonomian yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

telah menunjukkan hasil. Kecenderungan tersebut terutama terjadi pada kondisi sebelum krisis ekonomi.

Hukum Engel menyatakan dengan asumsi selera seseorang adalah tetap, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan akan semakin kecil seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan. Data pada Tabel 2 juga membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan akan semakin rendah pangsa pengeluaran pangan. Kecenderungan tersebut adalah konsisten, tidak hanya secara agregat nasional tetapi juga di Jawa Barat, walaupun ada perbedaan terletak pada laju penurunan pangsa pengeluaran pangan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang ditunjukkan oleh perubahan proporsi pengeluaran pangan antara tahun 1996 (sebelum krisis) dengan tahun 1999 (semenjak krisis). Penurunan proporsi pengeluaran di kota lebih besar dari pada di desa. Dengan demikian dampak negatif dari krisis ekonomi pada masyarakat kota lebih berat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Juga berarti dampak krisis ekonomi terhadap sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa lebih kecil daripada sektor non pertanian yang merupakan sumber pendapatan masyarakat kota.

Untuk memulihkan perekonomian nasional, pemerintah telah menetapkan serangkaian kebijakan baik di bidang ekonomi maupun dibidang yang lain. Akibat hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional dan propinsi Jawa Barat (kota dan desa) meningkat kembali. Sebagai contoh, pangsa pengeluaran pangan di propinsi Jawa Barat pada waktu krisis ekonomi sebesar 61,0 persen menurun menjadi 59,2 persen. Namun demikian, tingkat kesejahteraan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis ekonomi.

Pada Tabel 2 disajikan data pengeluaran pangan menurut kelompok pangan pasca krisis ekonomi . Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara agregat proporsi pengeluaran makanan/minuman jadi di kota terbesar dan mengalahkan pengeluaran untuk padi-padian. Pola kehidupan masyarakat kota dan desa adalah berbeda. Masyarakat kota banyak yang bekerja di luar rumah termasuk kaum wanita, sehingga mereka sering makan siang dalam bentuk makanan/minuman jadi, dan juga membeli makanan jadi untuk dibawa ke rumah. Selain itu jenis makanan/minuman jadi di kota sangat banyak dan tersedia di berbagai

tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun untuk di propinsi Jawa Barat, proporsi pengeluaran padi-padian masih terbesar, apalagi untuk wilayah pedesaan. Proporsi pengeluaran rumah tangga di perkotaan Jawa Barat untuk padi-padian sebesar 19,1 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 9,0 persen.

Kelompok padi-padian terdiri dari tiga komoditas pangan yaitu beras, jagung dan tepung terigu. Karena beras sebagai pangan pokok, proporsi pengeluaran untuk beras dalam kelompok padi-padian akan dominan. Propinsi Jawa Barat adalah salah satu propinsi yang dekat dengan ibukota Indonesia, sehingga gaya hidup termasuk gaya makan rumah tangga di wilayah ini akan terimbas dengan kehidupan rumah tangga di Jakarta. Kondisi sarana dan prasarana seperti jalan dan alat transportasi antara Jakarta dengan propinsi Jawa Barat sangat baik, yang berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat Jawa Barat. Karena keadaan seperti hal tersebut, pengeluaran makanan dan minuman jadi rumah tangga di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak jauh berbeda.

Tabel 2. Pengeluaran Pangan di Indonesia dan Propinsi Jawa Barat Menurut Kelompok Pangan, 2002 (%)

No.	Kelompok Pangan	Indonesia		Jawa Barat	
		Kota	Desa	Kota	Desa
1	Padi-padian	16,4	27,0	19,1	29,0
2	Umbi-umbian	0,9	1,4	0,9	1,0
3	Ikan	8,5	9,2	7,4	7,1
4	Daging	6,3	3,3	6,8	3,4
5	Telur+Susu	6,8	4,2	7,1	4,3
6	Sayuran	7,6	8,6	7,0	6,8
7	Kacang-kacangan	3,3	3,6	3,6	3,4
8	Buah-buahan	5,4	4,2	5,3	4,3
9	Minyak+Lemak	3,4	4,3	3,3	3,3
10	Bahan Minuman	4,2	5,2	3,8	3,5
11	Makanan/Minuman Jadi	21,2	11,4	18,0	15,2
12	Tembakau+ Sirih	10,7	12,7	12,0	13,7
13	Lainnya	5,3	4,9	5,7	5,0
	Total	100	100	100	100

Konsumsi Energi dan Protein

Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VI, 1998, terjadi perubahan tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein menjadi 2200 Kalori/kapita/hari (AKE) dan 48 gram/kapita/hari (AKP). Mengacu pada standar anjuran tersebut dan data pada Tabel 3, terlihat tingkat konsumsi energi rumah tangga di

Indonesia termasuk di propinsi Jawa Barat masih dibawah standar yang dianjurkan. Sebaliknya tingkat konsumsi protein rumah tangga sudah melebihi anjuran bahkan sejak sebelum krisis ekonomi.

Terdapat kecenderungan tingkat konsumsi energi di desa lebih tinggi daripada di kota dan sebaliknya tingkat konsumsi protein di desa lebih rendah daripada kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga akan memprioritaskan pada pangan dengan harga murah seperti pangan sumber energi, kemudian dengan semakin meningkatnya pendapatan, akan terjadi perubahan preferensi konsumsi yaitu dari pangan dengan harga murah beralih ke pangan yang harganya mahal seperti pangan sumber protein. Seperti terlihat pada Tabel 1, pendapatan rumah tangga (yang diproksi dengan pengeluaran) di desa memang lebih kecil dibandingkan dengan di kota. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya fenomena tersebut diatas.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein di Indonesia dan Propinsi Jawa Barat Menurut Wilayah.

Zat Gizi	Indonesia			Jawa Barat		
	1996	1999	2002	1996	1999	2002

Energi (kal/kap/hr)						
- Kota	1983,6 (92,3)	1802,3 (81,9)	1953,4 (88,8)	2078,6 (94,5)	1784,6 (81,1)	1985,5 (90,3)
- Desa	2040,2 (94,9)	1879,9 (85,5)	2011,5 (91,5)	2150,8 (97,8)	1984,7 (90,2)	2085,3 (94,8)
- Kota+Desa	2019,8 (94,0)	1849,4 (84,0)	1985,7 (90,3)	2119,3 (96,3)	1889,3 (85,9)	2032,8 (92,4)
Protein (gr/kap/hr)						
- Kota	55,9 (121,0)	49,3 (102,7)	56,0 (116,7)	59,1 (123,1)	48,6 (101,3)	56,6 (117,9)
- Desa	53,7 (116,2)	48,2 (100,4)	53,2 (110,8)	58,9 (122,7)	51,7 (107,7)	56,1 (116,9)
- Kota+Desa	54,5 (118,0)	48,7 (101,5)	54,4 (113,3)	59,0 (122,9)	50,2 (104,6)	56,3 (117,3)

Keterangan: Angka dalam kurung adalah % terhadap tingkat kecukupan anjuran untuk energi 2.200 kal/kap/hr dan protein = 48 gr/kap/hr.

Berdasarkan data tahun 2002 secara agregat nasional, tingkat konsumsi energi baru 96,5 persen dari kecukupan yang dianjurkan, sedangkan di propinsi Jawa Barat lebih kecil daripada rata-rata nasional yaitu 92,4 persen. Sementara untuk protein menunjukkan kebalikannya, tingkat konsumsi protein pada rumah tangga di Jawa Barat mencapai 117,3 persen lebih tinggi dibandingkan agregat nasional (116,9 %). Pola konsumsi seperti tersebut adalah tidak baik dan mahal, karena apabila energi yang dikonsumsi belum sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan maka protein akan dibakar oleh tubuh untuk menutupi kekurangan energi. Padahal harga per satuan energi yang berasal dari protein lebih mahal dibandingkan dengan energi yang berasal dari pangan sumber karbohidrat atau pangan pokok seperti beras, ubikayu dan lain-lain.

Pada waktu krisis ekonomi, konsumsi energi dan protein mengalami penurunan. Penurunan energi pada rumah tangga di Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu masing-masing 10,6 persen dan 8,4 persen. Demikian pula penurunan konsumsi protein di Jawa Barat juga lebih besar daripada agregat nasional (nasional : 10,6% ; Jawa Barat : 13,9%). Dari kecenderungan ini dapat diartikan bahwa

dampak negatif akibat krisis ekonomi pada rumah tangga di Jawa Barat lebih besar dibandingkan agregat nasional.

Bila dilihat menurut wilayah, penurunan konsumsi energi dan protein di kota lebih tinggi daripada di desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa dampak negatif krisis ekonomi lebih banyak dirasakan oleh rumah tangga di kota yang pada umumnya bekerja di sektor informal. Sektor informal terutama sektor industri terkena dampak yang parah sehingga harus menutup usahanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Menurut Irawan, dkk (2000) jumlah penduduk miskin pada tahun 1996 sebesar 22,3 juta orang meningkat menjadi 79,4 juta orang tahun 1999.. Pada waktu krisis ekonomi juga terjadi penurunan pendapatan dan kenaikan harga pangan dan non pangan, sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Pada pasca krisis ekonomi, konsumsi energi dan protein sudah meningkat kembali, namun demikian tingkat konsumsinya masih lebih kecil dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Konsumsi energi dan protein pada rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 1996 masing-masing sebesar 2119,3 Kalori/kapita/hari dan 58,9 gram/kapita/hari lebih tinggi daripada tahun 2002 masing-masing sebesar 2032,8 Kalori/kapita/hari dan 56,3 gram/kapita/hari.

Dalam konsumsi pangan, selain kuantitas juga harus diperhatikan masalah kualitas pangan. Walaupun secara kuantitas terpenuhi namun pangan yang dikonsumsi kurang beraneka ragam dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan manusia. Permasalahan ini yang masih serius dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti terlihat pada Tabel 4. Pola pangan masyarakat Indonesia masih dominan pada pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati. Konsumsi energi yang berasal dari pangan nabati mencapai sekitar 94 persen dan tertinggi berasal dari kelompok padi-padian. Demikian pula konsumsi protein juga dominan dari nabati sekitar 79 persen dan juga berasal dari kelompok padi-padian.

Tabel 4. Pangsa Konsumsi Energi dan Protein di Indonesia dan Propinsi Jawa Barat Menurut Kelompok Pangan, 2002 (%)

Kelompok Pangan	Indonesia		Jawa Barat	
	Energi	Protein	Energi	Protein
1. Nabati	94,0	78,3	94,1	79,8
- Padi-padian	52,3	44,8	54,9	46,4
- Umbi-umbian	2,8	0,8	2,0	0,7
- Sayuran	1,9	4,6	1,5	3,4
- Kacang-kacangan	3,6	11,7	3,5	11,4
- Buah-buahan	2,0	0,8	1,8	0,7
- Minyak+lemak	12,4	1,0	10,8	0,5
- Makanan/minuman jadi	9,9	9,8	11,8	11,5
- Lainnya	9,2	4,8	7,8	5,2
2. Hewani	6,0	21,7	5,9	20,2
- Ikan	2,1	13,2	1,7	10,9
- Daging	1,8	4,2	2,0	4,7
- Telur+susu	2,0	4,3	2,2	4,6
Total	100	100	100	100

Sumber: Susenas, 2002 (diolah).

Karena beras sebagai pangan pokok yang dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, maka sumbangan energi dari beras akan besar. Hasil rumusan Semiloka Penyusunan Kebijakan Perberasan (2000) menyebutkan bahwa beras menyumbang sekitar 60-65 persen dari total konsumsi energi. Dari aspek mutu gizi, ketergantungan yang tinggi terhadap pangan nabati adalah kurang baik karena kurang lengkapnya kandungan asam amino esensial pada pangan nabati. Padahal asam amino tersebut terutama berasal dari pangan hewani yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan kecerdasan manusia, yang berdampak pada kualitas sumberdaya manusia (Hardinsyah dan Martianto, 1992).

Pola dan Tingkat Konsumsi Pangan

Penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat). Kriteria yang digunakan seperti berikut : pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen, sedangkan pola pangan pokok beras + komoditas lain bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih dari 5 persen (Puslit Agro Ekonomi,1989). Berdasarkan kriteria tersebut, hasil analisis dengan menggunakan data Susenas 1979 diperoleh 11 jenis pola

pangan pokok, dimana beras menjadi pola pangan pokok tunggal atau utama di setiap propinsi. Sedangkan jenis pangan yang menjadi pola pangan pokok kedua adalah umbi-umbian, jagung, pisang dan sagu.

Penentuan pola pangan pokok terdahulu tidak memasukkan mie karena tingkat konsumsinya masih rendah sehingga sumbangan energi mie terhadap pangan sumber karbohidrat belum mencapai 5 persen. Seiring dengan berkembangnya produk mie, maka penentuan pola pangan pokok dimasukkan mie karena mie telah dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia baik di kota maupun di pedesaan dan di berbagai lapisan masyarakat (Sawit, 2003; Ariani dan Ashari, 2003). Hasil analisis penentuan pola pangan pokok dengan menggunakan data Susenas tahun 1996 dan 2002 disajikan pada Tabel 5.

Pada tahun 1996 secara agregat, pola konsumsi pangan pokok di Indonesia didominasi oleh beras, bahkan di pedesaan beras telah menjadi pola pokok tunggal. Namun setelah enam tahun kemudian, peranan umbi-umbian dan jagung telah tergeser dan diganti dengan mie instant. Sehingga pola pangan pokok pada tahun 2002 pada umumnya adalah beras+mie instant, bukan beras+umbi/jagung. Peran mie sebagai pangan pokok kedua terjadi di semua elemen masyarakat, tidak hanya pada rumah tangga menurut wilayah (kota dan desa) tetapi juga menurut kelompok pendapatan. Mie instant tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok pendapatan sedang dan tinggi tetapi juga kelompok pendapatan rendah. Menurut Sawit (2003) di Indonesia, pada kelompok rendah dan menengah, beralihnya pangan dari non terigu ke terigu atau produk olahannya begitu cepat dibandingkan di negara-negara Asia.

Tabel 5. Perkembangan Pola Pangan Pokok di Indonesia dan Propinsi Jawa Barat Menurut Wilayah dan Kelompok Pendapatan, Tahun 1996 - 2002

Wilayah	Indonesia		Jawa Barat	
	1996	2002	1996	2002
Kota				
- Rendah	Beras	Beras+Mie	Beras	Beras+Mie
- Sedang	Beras+Mie	Beras+Mie	Beras+Mie	Beras+Mie
- Tinggi	Beras+Mie	Beras+Mie	Beras+Mie	Beras+Mie
Desa				
- Rendah	Beras	Beras	Beras	Beras
- Sedang	Beras	Beras	Beras	Beras
- Tinggi	Beras	Beras	Beras+Mie	Beras+Mie

Sumber: Susenas, 1996, 2002 (diolah)

Produk gandum sesungguhnya bukan makanan pokok Indonesia karena kondisi fisik lingkungan yang tidak cocok. Adanya kebijakan impor gandum untuk diproses menjadi tepung di dalam negeri yang berlangsung lama dan dijual dengan harga yang relatif murah mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi mie. Monopoli impor gandum oleh Bulog dan proses penggilingannya oleh PT Bogasari Flour Mills serta kebijakan yang lain, mengakibatkan tepung terigu dapat dijumpai dimana-mana dalam jumlah yang melimpah. Selain itu rasa mie memang enak dan terdapat beragam jenis, bentuk dan cara masak seperti mie basah, mie kuah, mie instant dan produk mie lainnya.

Banyak produk mie yang dengan cepat diolah, disajikan dan dikonsumsi dengan kemasan yang bagus dan dengan variasi harga yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan produk mie sesuai dengan kemampuannya. Selain itu mie juga dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, tidak hanya di swalayan tetapi juga di pasar tradisional atau warung kecil di pedesaan. Promosi beragam jenis mie juga dilakukan secara gencar melalui berbagai media seperti media elektronik, cetak, kegiatan sosial dan lain-lain.

Beras telah menjadi makanan pokok masyarakat di berbagai wilayah, namun secara agregat konsumsi beras telah menurun, demikian pula di propinsi Jawa Barat. Konsumsi beras pada rumah tangga di kota di Jawa Barat pada tahun 1996 sebesar 113,6

kg menjadi 99,8 kg/kapita/tahun, sedangkan untuk di desa dari 135,2 kg menjadi 112,1 kg/kapita/tahun (Tabel 6). Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh faktor harga beras karena harga beras di pasaran relatif stabil bahkan cenderung menurun, namun karena semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan mungkin juga disebabkan semakin tingginya konsumsi makanan jadi belum dihitung dalam analisis ini.

Berdasarkan data primer di kabupaten Subang, harga beras pada tahun 1998 sebesar Rp. 2014/kg menurun menjadi Rp.1926 tahun 2000 dan Rp.2087/kg pada tahun 2001 (Malian, dkk ; 2003). Ini menunjukkan bahwa program stabilitas harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah telah menunjukkan keberhasilan. Walaupun sebenarnya program ini menghadapi banyak tantangan dan hambatan dari berbagai pihak terutama masyarakat yang pro petani karena dengan alasan petani selain sebagai produsen juga konsumen maka pemerintah menerapkan harga beras murah yang salah satu kebijakannya dengan mengimpor beras apabila harga beras domestik mengalami lonjakan.

Di negara maju, sudah banyak orang yang mengubah pola konsumsi pangan hewannya, dari *red meat* (daging-dagingan) ke *white meat* (ikan-ikanan), karena makan ikan lebih menyehatkan daripada makan daging. Namun kondisi di Indonesia, tingkat partisipasi konsumsi daging masih tinggi dan cenderung meningkat, apalagi untuk daging ayam. Konsumsi daging sapi masih rendah karena harga daging relatif mahal sehingga tidak semua lapisan masyarakat mampu membelinya.

Indonesia adalah negara maritim yang merupakan negara penghasil berbagai jenis ikan, justru masyarakatnya cenderung meninggalkan ikan dan menyenangi daging yang bahan baku pakan ternaknya masih diimpor. Kecenderungan ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak terutama dari pemerintah. Orientasi kebijakan ekspor ikan untuk memperoleh devisa jangan sampai menyebabkan harga ikan domestik menjadi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Padahal peranan ikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya sangat erat, karena asam amino yang diperlukan untuk kecerdasan pada ikan lebih lengkap dan juga efek sampingnya lebih sedikit. Mengonsumsi ikan dapat terhindar dari penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya.

Pada tahun 2002, tingkat konsumsi ikan segar di propinsi Jawa Barat setengahnya dari rata-rata agregat nasional yaitu 6,6 kg/kapita/tahun untuk di kota dan

8,7 kg/ kapita/tahun untuk di desa. Konsumsi ikan olahan di Jawa Barat sebesar 13,8 kg/kapita/tahun di kota dan 3,2 kg/kapita/tahun di desa, lebih besar dibandingkan dengan agregat nasional (Tabel 6). Sebenarnya konsumsi ikan masih bisa ditingkatkan mengingat potensi sumberdaya perikanan cukup besar baik dari perikanan tangkap (terutama untuk daerah pesisir) maupun hasil budidaya terutama ikan tawar. Selain itu pangan dari ikan tersedia di pasar dengan berbagai kualitas mulai dengan harga yang murah sampai harga mahal, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan daya beli yang bersangkutan, mungkin perlu penyuluhan pentingnya mengkonsumsi ikan dan hasil olahannya.

Tabel 6. Perkembangan Tingkat Konsumsi Beberapa Jenis Pangan Agregat Indonesia dan Propinsi Jawa Barat (kg/kap/th), Tahun 1996, 1999 dan 2002

No.	Jenis Pangan	Indonesia			Jawa Barat		
		1996	1999	2002	1996	1999	2002
1	Beras						
	- Kota	108,9	96,0	89,7	113,6	100,0	99,8
	- Desa	121,0	111,8	109,6	135,2	129,9	112,1
2	Ubikayu						
	- Kota	5,6	7,7	5,4	4,7	5,4	5,2
	- Desa	9,8	12,2	14,4	8,5	12,3	8,0
3	Jagung						
	- Kota	0,8	0,9	0,7	0,4	0,1	0,3
	- Desa	3,6	4,2	5,5	1,1	0,4	0,3
4	Daging sapi						
	- Kota	1,2	0,8	0,9	1,4	0,7	0,8
	- Desa	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5
5	Daging ayam						
	- Kota	5,2	2,5	4,4	6,7	3,1	5,5
	- Desa	2,7	1,2	1,5	2,6	1,2	4,2
6	Telur ayam						
	- Kota	7,4	5,0	6,6	8,0	5,2	7,3
	- Desa	4,6	3,1	3,9	4,4	2,7	6,1
7	Susu						
	- Kota	2,0	1,5	2,1	2,2	1,3	2,1
	- Desa	0,6	0,4	0,8	0,4	0,4	0,7
8	Ikan segar						
	- Kota	19,0	14,8	14,5	11,3	6,6	6,6
	- Desa	14,6	12,2	12,2	3,4	3,0	8,7
9	Ikan olahan						
	- Kota	1,7	1,5	2,4	2,7	2,3	3,8
	- Desa	2,8	2,4	2,7	2,1	1,8	3,2

Sumber: Susenas, 1996, 1999, 2002 (diolah).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat (baik di tingkat nasional maupun di Propinsi Jawa Barat) mengalami penurunan sejak terjadinya krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi lebih besar pengaruhnya pada masyarakat kota dibandingkan dengan di pedesaan. Tingkat kesejahteraan pada pasca krisis ekonomi sudah membaik, namun masih lebih rendah dibandingkan keadaan sebelum krisis ekonomi.
2. Konsumsi energi dan protein pada krisis ekonomi juga menurun dan penurunan kedua zat gizi tersebut di propinsi Jawa Barat lebih besar daripada agregat nasional. Pada pasca krisis ekonomi, tingkat konsumsi energi dan protein meningkat kembali.

Selain itu, kualitas konsumsi pangan masih rendah (baik di Jawa Barat maupun agregat nasional), masih didominasi pada pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati.

3. Konsumsi beras rumah tangga di Propinsi Jawa Barat menurun setelah pasca krisis, sedangkan tingkat konsumsi mie instan meningkat. Pola konsumsi pangan pokok juga berubah dari pola beras menjadi pola beras+mie instan, baik menurut wilayah maupun kelompok pendapatan.

Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan pengembangan program diversifikasi pangan di masa mendatang perlu dilakukan dengan lebih seksama, didukung oleh pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan daya beli serta peningkatan ketersediaan untuk beberapa komoditas seperti pangan hewani, sayuran dan buah, serta kacang-kacangan (kedele) untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia.
3. Penyadaran masyarakat akan pangan dan gizi serta kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. *Political will* dan *political power* dari pemerintah menjadi ujung tombak keberhasilan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., H.P. Saliem, S.H. Suharitini, Wahida dan M.H. Sawit. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Konsumsi Pangan Rumahtangga. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Ariani, M dan Ashari. 2003. Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi. Vol. 21, No. 2. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Erwidodo, H.P. Saliem, M.Ariani dan E. Ariningsih. 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Hardinsyah dan D.Martianto. 1992. Gizi Terapan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen.Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, IPB. Bogor

- Irawan, P.B dan H. Romdiati. 2000. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya Untuk Strategi Pembangunan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Februari-2 Maret. LIPI, Jakarta.
- LP-IPB. 2000. Laporan Kegiatan Seminar-Lokakarya Penyusunan Kebijakan Perberasan. LP-IPB Bekerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura, Deptan. Bogor.
- Pusat Penelitian Agro Ekonomi. 1989. Pola Konsumsi Pangan, Proporsi dan Ciri Rumah Tangga Dengan Konsumsi Energi Dibawah Standar Kebutuhan. Kerjasama Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Depkes. dengan PAE, Deptan. Bogor.
- Sawit, M.H. 2003. Kebijakan Gandum/Terigu: Harus Mampu Menumbuh-kembangkan Industri Pangan Dalam Negeri. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 1 (2): 100-109. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H. dan M. Ariani. 1997. Ketahanan Pangan : Konsep, Kebijaksanaan dan Pelaksanaannya. Makalah disampaikan pada Seminar Pra-WKNPG VI, Bulog, Jakarta 26 – 27 Juni.
- Saliem, H.P.,M. Ariani, Y. Marisa dan T.B.Purwantini. 2002. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suryana,A. 2004. Ketahanan Pangan di Indonesia. Makalah pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Jakarta, 17-19 Mei. LIPI.